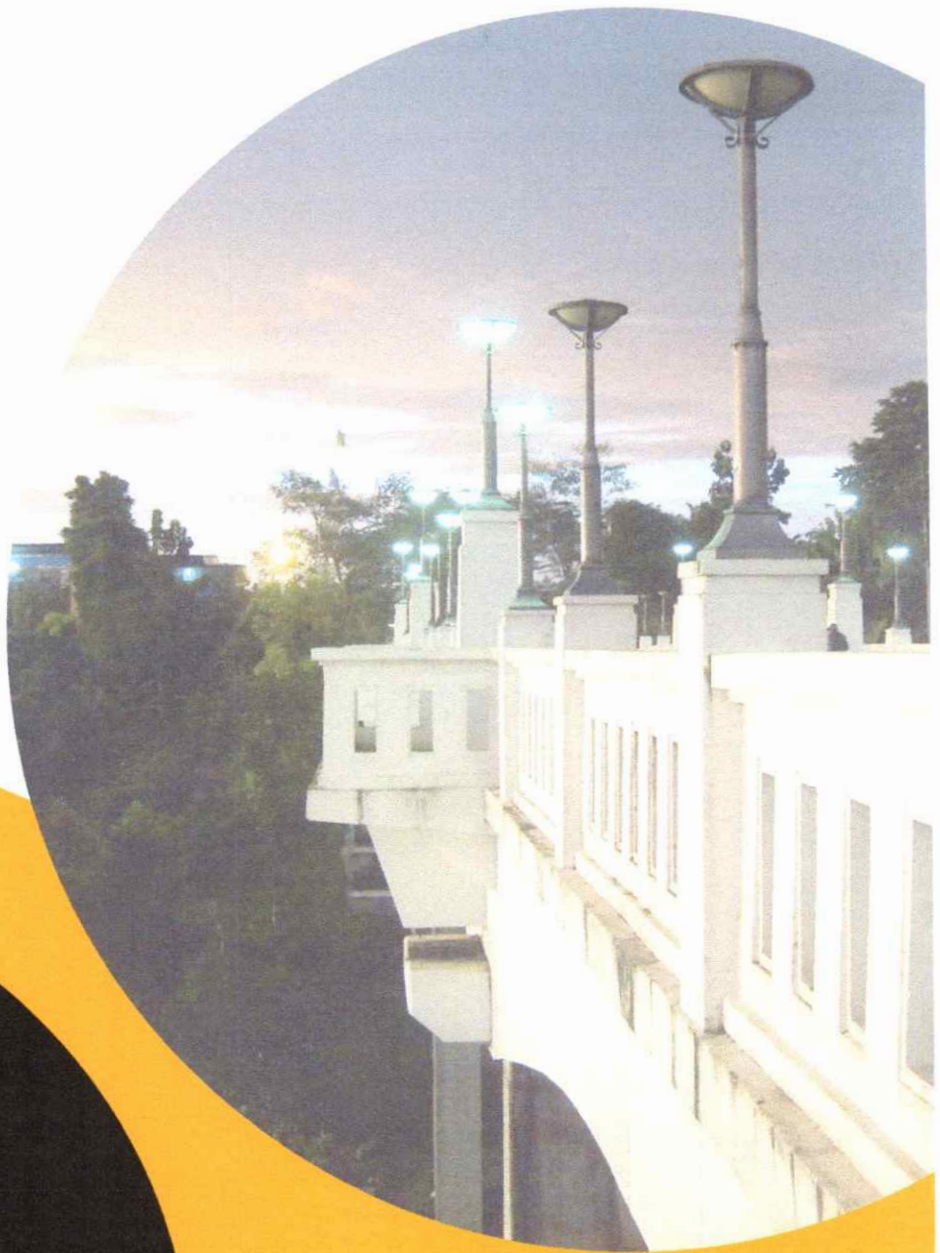


DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

RENJA



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2023 yang mengacu pada realisasi kinerja tahun anggaran 2022, Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan ditahun 2023.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi serta pemberdayaan masyarakat namun demikian kami berharap Renja ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023.

Kami berharap melalui Rencana (RENJA) ini, Dinas Sosial Kota Cimahi dapat mewujudkan Visi Kota Cimahi 2023-2023 yaitu Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera.

Cimahi, 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,**



Drs. GUNTUR PRIYAMBADA
Pembina Tingkat I
NIP. 19660329 199201 1003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Sosial memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta selaras pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dilakukan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, sebelum terpisah menjadi dinas yang mandiri dalam hal urusan sosial yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Masalah kemiskinan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Adanya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cimahi yang cukup banyak karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid-19 sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Sosial Kota Cimahi mengampu Misi 1 pada Visi dan Misi 2023-2026 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan misi yang diampu oleh Dinas Sosial Kota Cimahi

maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Dinas Sosial dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
-
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana terdiri atas:
 - a) Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Analisis Data.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dimaksud tercantum dalam Lampiran.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan structural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kota Cimahi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- i. Peraturan Menteri terkait urusan masing-masing perangkat daerah
- j. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

- k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- l. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- m. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- n. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 mempunyai maksud sebagai berikut :

- 1. Memberikan gambaran yang jelas kepada Dinas Sosial yang baru terbentuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah

- 1. Supaya memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2023 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tupoksi
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Capai Renja tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Penting
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Reasoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan Evaluasi Renja yang dilakukan oleh Dinas Sosial merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya

Dinas Sosial Kota Cimahi dalam evaluasi pelaksanaan Renja secara menyeluruh masih tidak lepas dari organisasi induknya yaitu Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, karena Dinas Sosial merupakan OPD baru yang terlepas dari DINSOSP2KBP3A. Karena Dinas Sosial melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial maka evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 hanya mengambil urusan sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2022 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2022. Pada tahun 2022 anggaran yang diterima oleh DINAS SOSIAL Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 14.471.447.272,-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program dan 14 Kegiatan 44 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp. 14.471.447.272,- sampai pada semester 1 terealisasi sebesar Rp. 3.500.321.887,- atau sebesar 25 % merupakan hasil yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang sudah direncanakan. Dari anggaran yang direncanakan terdapat beberapa Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan diantaranya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga terkendala dengan aturan penandatanganan Peraturan Wali Kota harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, kegiatan pengelolaan data fakir miskin dan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota juga masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial dan belum adanya indikator kesejahteraan sosial. Dinas Sosial sudah melakukan berbagai

upaya seperti berkoordinasi dengan bagian hukum dengan membuat surat kemendesakan kepada Plt. Wali Kota supaya Peraturan Wali Kota tentang Beras Sejahtera Daerah dapat segera ditetapkan dan fasilitasi bantuan sosial kepada keluarga berupa pemberian Rastrada dapat direalisasikan. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan hasil yang maksimal.

Belanja langsung yang ada pada DPA Dinas Sosial terbagi pada 5 (lima) program diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.110.478.472,- Terdiri dari 7 kegiatan 18 Sub kegiatan. Sasaran urusan ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Sosial melalui ketertiban administrasi, kapasitas aparatur yang handal bagi pelayanan masyarakat serta kualitas perencanaan bagi pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.751.288.600,- terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatnya kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.421.962.400,- terdiri dari 2 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatkan pelayanan dasar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat di luar panti dan Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.408.744.800,- terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan social.
- e. Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 778.973.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Sasaran Program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas, dalam penilaian kinerja Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi didasarkan pada kajian capai kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang diterapkan dalam rencana strategis meliputi :

1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi hak dasarnya diantaranya :
 - a. Prosentase Penanganan Pemberdayaan PPKS capaiannya 100 %
 - b. Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar capaiannya 100 %
 - c. Prosentase PPKS yang direhabilitasi 100 %
2. Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial yaitu :
 - a. Meningkatnya jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi capaiannya 20 %
 - b. Meningkatnya LKS yang terakreditasi 100 %
3. Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan cara meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan korban bencana, meningkatkan pelatihan bagi tagana serta terbentuknya kampung siaga bencana:
 - Meningkatnya penanganan pemberdayaan PPKS capaiannya 100 %
 - pembentukan kampung siaga bencana di 2 (dua) kelurahan
4. Cakupan layanan kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan meningkatnya pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan sosial untuk dapat dimasukkan kedalam DTKS.

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan social;
2. Masih rendahnya peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisi kebutuhan yang telah dipertimbangkan, kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp.81.158.000,-
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.53.430.000,-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.5.211.443.252,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD semula Rp.48.709.500,-

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp.130.230.000,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu : Rp.8.565.000,-
- b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rp.106.372.900,-
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.29.414.600,-
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.34.283.000,-
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu Rp.9.000.000,-
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Rp. 142.919.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp.299.700.000,-

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Rp.68.100.000,-
- b. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Rp.14.730.000,-
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.48.623.000,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.124.058.248,-

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 822.984.700,-
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp.147.168.000,-
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp.897.878.500,-
- d. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Rp.223.194.900,-

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti

- a. Penyediaan Permakanan Rp.103.440.000,-
- b. Penyediaan Sandang Rp.135.090.000
- c. Penyediaan Alat Bantu Rp.173.550.000
- d. Pemberiaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp.9.600.000,-
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp.667.166.000,-

- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp.170.100.000,-
- g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak Rp.5.400.000,-
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp.5.400.000,-
- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Rp.82.813.400,-
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan Rp.54.315.000,-
- k. Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga Rp.10.800.000,-
- l. Pemberian Layanan Rujukan Rp.76.080.000,-

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korba HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Rp.8.327.500,-
- b. Pemberian Layanan Kedaruratan Rp.7.200.000,-
- c. Penyediaan Permakanan Rp.10.000.000,-
- d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti Rp.34.330.000,-

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp.81.978.100,-
- b. Rujukan Anak-Anak Terlantar Rp.21.323.900,-
- c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Rp.42.315.000,-

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.545.482.300,-
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.296.973.000,-
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp.3.349.099.000,-

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Makanan Rp.76.340.000,-
- b. Penyediaan Sandang Rp.54.800.000,-
- c. Pelayanan Dukungan Psikososial Rp.11.900.000,-

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Rp.59.427.200
- b. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Rp.547.199.000,-

Matrik Renja secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								15,222,412,000				12,282,521,750	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,410,736,500				6,521,033,750	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								134,588,000				106,463,000	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	2 Dokumen	2 Dokumen	81,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,023,000	
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	4 Laporan	4 Laporan	53,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,440,000	
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,260,152,752				5,364,383,050	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	5,211,443,252	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,315,673,050	
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	umlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan akhir tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Laporan	1 Laporan	48,709,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			48,710,000	
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								130,230,000				173,090,000	
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai Yang Dibina;	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	65 Orang	100%	130,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,090,000	
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								330,554,500				304,964,700	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Paket	12 Bulan	8,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,565,000	
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Paket	12 Bulan	106,372,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106,373,100	
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Paket	12 Bulan	29,414,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,414,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Paket	12 Bulan	34,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,593,000	
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Laporan	12 Bulan	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,000,000	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Laporan	12 Bulan	142,919,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124,019,000	
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							299,700,000				300,000,000		
1	6	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengadaan Sewa Bangunan	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	3 Unit	12 Bulan	299,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							131,453,000				144,023,000		
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	2 Laporan	12 Bulan	68,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,900,000	
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Laporan	12 Bulan	14,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,800,000	
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	1 Laporan	12 Bulan	48,623,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,323,000	
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							124,058,248				128,110,000		
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Profesionalitas ASN; Nilai IKM Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Cimahi	50 Nilai; B Nilai; B Nilai;	2 Unit	12 Bulan	124,058,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128,110,000	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							2,091,226,100				2,019,299,000		
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							2,091,226,100				2,019,299,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Kota Cimahi	69,23 persen	18 Orang	28 Orang	822,984,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			829,033,800	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Kota Cimahi	69,23 persen	6 Orang	28 Orang	147,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			169,624,000	
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Kota Cimahi	69,23 persen	3 Lembaga	28 Orang	897,878,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			797,297,200	
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	Kota Cimahi	69,23 persen	4 Sertifikat	28 Orang	223,194,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			223,344,000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,553,611,900	1,460,515,900				
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1,493,754,400	1,400,658,400				
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase Penyandang Disabiltar Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang Mendapatkan penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	100 persen	100 Persen	103,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,344,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	870 Orang	100 Persen	135,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,090,000	
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkanAlat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	173,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,550,000	
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,600,000	
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	700 Orang	100 Persen	667,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			667,166,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	450 Orang	100 Persen	170,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			170,100,000	
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	24 Orang	100 Persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,400,000	
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	24 Orang	100 Persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,400,000	
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	24 Orang	100 Persen	82,813,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,813,400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	24 Orang	100 Persen	54,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,315,000	
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	36 Orang	100 Persen	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,800,000	
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Kota Cimahi	100 Persen	48 Orang	100 Persen	76,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			76,080,000	
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								59,857,500	59,857,500				
1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial;	Kota Cimahi	100 persen	50 Orang	100 persen	8,327,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,327,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial;	Kota Cimahi	100 persen	24 Orang	100 persen	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,200,000	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial;	Kota Cimahi	100 persen	50 Orang	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial;	Kota Cimahi	100 persen	24 Orang	100 persen	34,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,330,000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								4,417,171,300				1,474,405,900	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								145,617,000				145,617,000	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan	Kota Cimahi	20 persen	20 Orang	100 Persen	81,978,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			81,978,100	
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan	Kota Cimahi	20 persen	8 Orang	100 Persen	21,323,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,323,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan	Kota Cimahi	20 persen	8 Orang	100 Persen	42,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,315,000	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								4,271,554,300	1,328,788,900				
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah bulan fasilitasi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Kota Cimahi	20 persen	40000 Orang	12 Bulan	545,482,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			526,200,000	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Kota Cimahi	20 persen	10000 Keluarga	12 Bulan	296,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			307,613,000	
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Kota Cimahi	20 persen	1500 Keluarga	12 Bulan	3,349,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			414,975,900	
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Kota Cimahi	20 persen	30 Orang	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								749,666,200	807,267,200				
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								143,040,000	206,700,000				
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Cimahi	100 Persen	100 Orang	100 Persen	76,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Cimahi	100 Persen	100 Orang	100 Persen	54,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124,800,000	
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Kota Cimahi	100 Persen	10 Orang	100 Persen	11,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,900,000	
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								606,626,200	600,567,200				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Prosentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	100 Persen	1 Kampung		59,427,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59,427,200	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Prosentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	100 Persen	40 Orang		547,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			541,140,000	
TOTAL													15,222,412,000				12,282,521,750	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial 2023 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, yang terdiri dari 5 (lima) Program, 14 Kegiatan dan 48 sub Kegiatan. Jumlah Rencana Anggaran Tahun 2023 Secara keseluruhan berjumlah Rp.15.222.412.000,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukunga sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala Dinas Sosial wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2023 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Plt.Wali Kota melalui kepala Bapelitbangda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,**



Drs. GUNTUR PRIYAMBADA
Pembina Tingkat I
NIP. 19660329 199201 1003